

BAB IV

P E N U T U P

IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dikategorikan **Sangat Baik**, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Di antara capaian 19 (Sembilan Belas) Tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 (satu) Tujuan dengan capaian Cukup Baik dan 5 (lima) Tujuan dengan capaian Baik. sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi Sangat Baik adalah :

1. Meningkatkan Net Eksport Perdagangan Dalam dan Luar Negeri , dengan capaian Cukup Baik;
2. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dengan capaian Baik;
3. Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri, dengan capaian Baik;
4. Meningkatkan Ketersedian dan Kualitas Infrastruktur untuk Mengembangkan Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat, dengan capaian Baik;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Kelestariannya, dengan capaian Baik; dan
6. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak Azasi Manusia (HAM) Yang Berkeadilan, dengan capaian Baik.

IV.2. PERMASALAHAN

IV.2.1. Meningkatkan Net Eksport Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

- a. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah.
- b. Masih rendahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan lebih disebabkan oleh defisit migas dan jasa yang semakin membesar.
- c. Belum optimalnya intensitas perdagangan antar daerah karena belum tersedianya informasi pasar antar daerah, dan
- d. Belum stabilnya harga produk agro dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.

IV.2.2. Meningkatkan perluasan lapangan kerja.

- a. Banyaknya PHK Kondisi terakhir di tahun 2015, 369 perusahaan melakukan PHK terhadap 7.450 tenaga kerja.
- b. Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2015 naik cukup signifikan sebesar 19,13% (rata-rata UMK Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 1.547.596) menyebabkan sentimen negatif tentang jaminan keamanan dan investasi biaya tinggi.
- c. Pemulangan TKI Bermasalah/non prosedural. Pada tahun 2014, sebanyak 7.493 orang TKI bermasalah/deportasi dipulangkan dari Malaysia, sedangkan selama tahun 2015 terjadi pemulangan sebanyak 6.121 orang.

IV.2.3. Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri .

- a. Perlambatan ekonomi global.
- b. Beban biaya bahan baku karena pelemahan nilai Rupiah Terhadap US Dollar menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan.
- c. Marjin/Keuntungan Industri Pengolahan masih relatif kecil, berada di kisaran 5%-10%, lebih rendah.

IV.2.4. Meningkatkan Ketersedian dan Kualitas Infrastruktur untuk Mengembangkan Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat.

- a. Belum tercapainya tingkat pelayanan jalan provinsi disebabkan oleh:

1. Terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor) di beberapa wilayah di Jawa Timur.
 2. Terjadinya anomali cuaca.
 3. Adanya pembebanan berlebih (overload) pada beberapa ruas jalan provinsi sehingga mengakibatkan kerusakan dini.
- b. Belum selarasnya pembangunan jalan baru dengan RTRW provinsi maupun kabupaten/ kota.
 - c. Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat di perkotaan dan belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah serta pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
 - d. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak
- IV.2.5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Kelestariannya.
- a. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. Meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat setempat didalam pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA). Meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut merupakan indikator berhasilnya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada masyarakat setempat sebagai pemanfaat SDA. Materi sosialisasi yang sering disampaikan kepada masyarakat diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air, terjadinya musim kemarau yang sangat panjang selama tahun 2015, yang menyebabkan debit air sungai menurun, sementara debit air limbah dari industri maupun kegiatan domestik tetap.

- c. Belum terkontrolnya buangan air limbah hasil kegiatan domestik karena samapai sekarang belum ada pengolahan limbah domestik yang terpusat sebelum limbah tersebut dibuang kedalam badan air/ sungai.

IV.2.6. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak Azasi Manusia (HAM) Yang Berkeadilan.

- a. *Kejadian terkait HAM*, jumlah dan kepadatan penduduk di Jawa Timur juga membawa banyaknya permasalahan yang muncul baik konflik maupun kejadian yang berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM. Begitu pula masih banyaknya masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang HAM, sehingga tantangan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah mendorong panutan masyarakat untuk menterjemahkan dan mensosialisasikan tentang pemenuhan dan penguatan HAM secara simultan, terkoordinasi dan sinergis. Sampai saat ini demokrasi masih banyak dipahami sebagai kebebasan tanpa ada rasa tanggung jawab moral dan sosial yang tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila, sehingga banyak terjadi kerusuhan maupun konflik.
- b. *Ormas/LSM yang terdaftar*, realisasi yang diperoleh tersebut karena erat kaitan dengan diterbitkannya UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti dari UU No 8 Tahun 1985, dimana terdapat beberapa Pasal yang memberatkan bagi Ormas/LSM khususnya terkait dengan jenjang kepengurusan. Sementara yang masih dipahami baru UU yang lama yaitu UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu pengganti UU yang mengatur Ormas sesuai dengan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat terbitnya Keputusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas nomor 82/PUU-

XI/2013/2013 tanggal 23 Desember 2014, khususnya terkait dengan teknis pendaftaran Ormas yang salah satunya menyebutkan bahwa pada prinsipnya Ormas dapat terdaftar disetiap tingkat instansi pemerintahan dan dapat juga tidak terdaftar.

IV.3 LANGKAH KEDEPAN

Langkah kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

IV.3.1. Meningkatkan Net Ekspor Perdagangan Dalam dan Luar Negeri :

- a. Untuk menekan tingginya biaya logistik, pemerintah memprogramkan tol laut.
- b. Meningkatkan Perlindungan Konsumen melalui pengawasan barang beredar dan Pelayanan Kemetrolgian.
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- d. Pembentukan Kantor Perwakilan Dagang (KPD).
- e. Database Perdagangan Antar Daerah.
- f. Pengembangan Jatim Mart, yaitu showroom produk dan jasa Jawa Timur (B2B) di luar negeri, baik showroom secara fisik maupun secara online. Showroom secara fisik akan dibangun di 10 negara ASEAN mulai tahun 2016 s.d 2020, dimulai dengan Singapura dan Vietnam di tahun 2016. Juga di China dan Eropa.
- g. Promosi dan Jejaring Pasar Luar Negeri.

IV.3.2. Meningkatkan perluasan lapangan kerja :

- a. Program cegah PHK guna menahan bertambahnya pengangguran baru.
- b. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
- c. Pengembangan dan perluasan jejaring informasi pasar kerja melalui layanan penempatan “Ayo Kerja Jatim”.

- d. Membuka jaringan Bursa Kerja ke daerah lain dan provinsi lain, perguruan tinggi, dan SMK di Jawa Timur secara *online*, juga menyelenggarakan bursa kerja bulanan (*mini job fair*) serta menggalakkan bulan pasar kerja di Kabupaten/Kota.
- e. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) disertai sertifikasi kompetensi tenaga kerja di 16 UPT Pelatihan Kerja (BLK), didukung dengan implementasi Pola 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan).
- f. Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui *upgrading* Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan.
- g. Pembinaan di sektor informal melalui pelatihan/pembinaan dan pendampingan usaha mandiri (wirausaha).
- h. Memperbanyak program magang di perusahaan bagi peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, mendorong pelaksanaan magang mandiri, serta magang ke luar negeri (Jepang).
- i. Meningkatkan peran Unit Reaksi Cepat (URC) Ketenagakerjaan dan fungsi LKS Bipartit untuk menciptakan harmonisasi hubungan industrial.
- j. Melakukan pendataan korban PHK dan membekali pelatihan melalui Pelatihan Alih Kerja (PAKER).
- k. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalisasi keberangkatan TKI non prosedural.

IV.3.3. Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri:

- a. Mendorong konsumsi pemerintah dengan realisasi proyek pembangunan infrastruktur mampu mendorong kinerja industri bahan bangunan, seperti industri semen.
- b. Substitusi bahan baku impor dengan bahan baku lokal sebagai langkah efisiensi.
- c. Pemerintah provinsi mendukung regulasi yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat, diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan, diantaranya

insentif penurunan tarif berdasarkan penyesuaian sebesar 2,6% dan diskon 30% bagi pelanggan listrik golongan industri pengolahan yang memakai beban pada pukul 23.00 s.d 08.00. Kebijakan ini diharapkan mendorong industri pengolahan untuk semakin memaksimalkan penggunaan mesin-mesin produksi.

- d. Mekanisme penetapan upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2016 yang mudah dihitung (berasal dari penjumlahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi), diperkirakan dapat menumbuhkan optimisme kalangan usaha seiring dengan upah yang lebih terprediksi.
- e. Menjaga iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur, untuk menarik investor asing dalam Penanaman Modal Asing (PMA).
- f. Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) secara paripurna, berkesinambungan dimulai dari stimulan bahan baku, proses pengolahan, sampai pemasarannya.
- g. Pengembangan IKM Premier
- h. Fasilitasi dan Kemudahan Industri Besar
- i. Peningkatan Kualitas & Konstinuitas Produk melalui standarisasi produk
- j. Penumbuhan Populasi Industri.

IV.3.4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mengembangkan Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat :

- a. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat.
- b. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air bersih sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku).
- c. Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas SDM pengelola

pelayanan air bersih.

- d. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat
- e. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR.

IV.3.5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Kelestariannya :

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas daerah serta lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya air agar lebih terintegrasi dan lebih baik sehingga program/kegiatan yang dilakukan akan lebih efektif dan mampu menghemat anggaran (efisiensi anggaran).
- b. Lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi yang ditujukan terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang berinteraksi dan pemanfaat langsung sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam (air) demi keberlangsungan kehidupan, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga turut berperanserta/partisipasi didalam menjaga dan mengelola sumber daya alam (air), memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kewajiban/tanggungjawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam (air) merupakan tanggungjawab bersama bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata seperti persepsi yang berkembang selama ini;. Dengan demikian kerja pemerintah didalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam ini menjadi lebih ringan dan lebih efektif dan efisien.

IV.3.6. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak Azasi Manusia (HAM) Yang Berkeadilan :

- a. Dilakukan upaya memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi demokrasi dengan memperdalam budaya demokrasi Indonesia. Melalui RANHAM, maka laporan, pemantauan dan evaluasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakkan HAM di Jawa Timur menjadi lebih dipahami oleh masyarakat, diaplikasikan oleh SKPD/Instansi/ Lembaga /Organisasi (elemen pemerintah dan masyarakat), dilaporkan dan diawasi oleh lembaga terkait, terpublikasikan pada dunia internasional, dan dihormati/dimajukan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah. Dengan berbagai kegiatan RANHAM dimaksud, secara langsung atau tidak langsung telah berpengaruh terhadap penurunan kejadian Hak Asasi Manusia, karena masyarakat dan aparatur negara saling memahami kedudukan dan fungsinya dalam mengawal aplikasi hak asasi manusia di daerah dan masyarakat diajak untuk berperan dalam pengembangan dan aplikasi HAM dalam perumusan dan perencanaan pembangunan di Jawa Timur.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui peningkatan peran serta Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Elemen Masyarakat dalam mewujudkan Visi Jawa Timur, yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang partisipatif, demokratis, aman dan damai dalam wadah NKRI.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur.